

---

## **Retorika Militeristik dalam Pidato Presiden Prabowo (Analisis Wacana, Gaya Bahasa, dan Retorika Aristoteles)**

**Muhammad Ikhwan**

Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur Jakarta

Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. 12260, Indonesia

Email: [Muhammad.ikhwan@budiluhur.ac.id](mailto:Muhammad.ikhwan@budiluhur.ac.id)

### *Abstract*

*Prabowo's military background not only influences his political decisions but is also reflected in his rhetoric. This study aims to examine the representation of militaristic values in his speech at the Merah Putih Cabinet retreat. The speech analysis was conducted in three stages. First, using the critical discourse analysis theory through Norman Fairclough's approach. Second, by analyzing aspects of language style, and third, using Aristotle's rhetorical theory. The results showed that militaristic symbols were clearly visible in the choice of words, phrases, and terms in Prabowo's speech. Furthermore, it was also evident in the choice of activity location, the attire of participants, and the event material, which had a military nuance. From the text analysis, Prabowo frequently used the word "I," a personal pronoun that conveys authority and power. Prabowo also used many militaristic terms, such as knight, senior, struggling, cadet, and subordinate. Discursive strategies emerged to foster obedience and loyalty from subordinates to superiors, as well as glorify the military. In terms of language style, Prabowo used eight styles: repetition, allegory, hyperbole, personification, parallelism, irony, climax, and metaphor. From the perspective of Aristotle's rhetorical theory, Prabowo's speech fulfills all three elements: ethos, pathos, and logos.*

**Keywords:** Cabinet, Power, Militarism, Prabowo Subianto, Rhetoric.

### **Abstrak**

Latar belakang militer Prabowo tidak hanya memengaruhi keputusan politiknya, tetapi juga tercermin dalam retorika yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat representasi nilai-nilai militeristik dalam pidato pada kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Magelang. Analisis pidato dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, dengan teori analisis wacana kritis melalui pendekatan Norman Fairclough. Kedua dengan menganalisis aspek gaya bahasa. Ketiga, dengan teori retorika Aristoteles yang menjadi tiga aspek, yaitu ethos, pathos, dan logos. Hasilnya, simbol militeristik sangat terlihat dalam pilihan kata, frasa, dan istilah yang digunakan Prabowo. Selain itu, terlihat pula dari pemilihan lokasi kegiatan, pakaian yang digunakan peserta, hingga materi acara yang bernuansa militer. Dari analisis teks, Prabowo banyak menggunakan kata "saya", yaitu kata persona yang menggambarkan dirinya memiliki otoritas dan kekuasaan. Prabowo juga menggunakan banyak istilah berbau militeristik, seperti kesatria, senior, berjuang, taruna, dan anak buah. Strategi diskursif dimunculkan untuk menumbuhkan kepatuhan dan loyalitas bawahan terhadap atasan serta glorifikasi terhadap militer. Dari aspek penggunaan gaya bahasa, Prabowo menggunakan delapan gaya bahasa. Yakni repetisi, alegori, hiperbola, personifikasi, paralelisme, ironi, klimaks dan metafora. Dari aspek teori retorika Aristoteles, pidato Prabowo telah memenuhi ketiga unsur, yakni ethos, pathos dan logos.

**Kata Kunci :** Kabinet, Kekuasaan, Militeristik, Prabowo Subianto, Retorika.

## Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, retorika militeristik menjadi ciri khas yang menonjol dalam pidato politik sejumlah pemimpin dunia. Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, Vladimir Putin di Rusia, dan Xi Jinping di Tiongkok kerap menggunakan diksi dan metafora militer dalam pidato kenegaraan mereka. "*We are going to defeat the invisible enemy.*" Kalimat bernada perang tersebut disampaikan Trump terkait perang melawan COVID-19 dan penolakannya terhadap migran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat (Mason & Holland, 2020). Dalam sejarah, Mussolini, Hitler, atau Soeharto juga kerap menggunakan bahasa militer sebagai alat legitimasi kekuasaan dan untuk mengendalikan masyarakat.

Di Indonesia, penggunaan simbol militeristik juga kerap terlihat pada Prabowo Subianto. Pada beberapa ajang pemilihan presiden, gaya maskulin dan perilaku militeristik Prabowo merupakan bagian dari political branding yang telah melekat sejak lama (Triyogo et al., 2023). Citra militeristik itu tidak hanya tampak dalam retorika, tetapi juga pada pakaian safari yang biasa ia kenakan. Pada Pemilu 2019, Prabowo tampil dengan gaya komunikasi yang tegas dan emosional, serta citra militeristik melalui pakaian safari dan kampanye yang bersifat konfrontatif (Maqfirah et al., 2025).

Simbol militeristik ini tidak terlepas dari latar belakang Prabowo yang menghabiskan hampir separuh hidupnya di dunia militer. Latar

belakang militer itu tidak hanya memengaruhi keputusan politiknya, tetapi juga tercermin dalam retorika yang digunakan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana representasi sikap militeristik terlihat dalam retorika yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya. Pidato yang diteliti adalah pidato saat retreat atau pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Lembah Tidar, Magelang, pada 24 Oktober 2024.

Mencermati retorika dalam pidato Prabowo, publik selama ini cenderung hanya memahami pesan yang tampak. Padahal, pesan tersembunyi (laten) juga penting dan menarik untuk dianalisis agar kita bisa memahami gaya, visi, dan ideologi kepemimpinan Prabowo. Bagaimanapun, lebih dari sekadar alat persuasi, pidato sesungguhnya juga berfungsi sebagai media untuk memperkuat identitas politik dan memperjelas posisi ideologis (Fikri, 2020).

Retorika dalam pidato adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dahulu retorika tidak dipandang sebagai ilmu, melainkan hanya sebagai kecakapan berpidato. Dalam perkembangan selanjutnya, retorika sudah dikategorikan sebagai ilmu, tidak lagi hanya berlandaskan pada metode-metode koherensif atau asumsi. Kajian retorika memiliki fokus pembahasan tentang tata cara seorang komunikator untuk mengembangkan dan memilih strategi-strategi tertentu dalam upaya menyampaikan pesan kepada komunikan (*audience*) (Fikri, 2020)

Dalam perspektif Aristoteles, retorika adalah seni untuk menemukan

cara terbaik dalam menyampaikan argumen yang dapat meyakinkan audiens. Dalam politik modern, retorika tidak hanya digunakan untuk membujuk, tetapi juga untuk membentuk persepsi publik dan menciptakan konsensus terhadap kebijakan tertentu. (Kasma N et al., 2025)

Bila didefinisikan secara lengkap, retorika mencakup seni membangun argumen dan pidato yang berevolusi menjadi cara manusia menggunakan simbol untuk memengaruhi orang lain dan membangun dunia mereka. Retorika juga merupakan seni berbicara yang bertujuan untuk memengaruhi, membujuk, dan meyakinkan audiens (Littlejohn, West & Turner dalam Isa, 2024; Arfa, 2024).

Dalam dunia politik, retorika sering kali digunakan untuk mempersuasi audiens agar mempercayai pesan yang disampaikan dan mengikuti apa yang diinginkan pembicara. Dalam konteks penelitian ini, retorika digunakan untuk meyakinkan pendengar bahwa konsep militeristik bukanlah sesuatu yang tabu, ditakuti, atau harus dihindari. Retorika dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi nilai-nilai militer dalam praktik pemerintahan. Terlebih, komunikator dalam retorika tersebut adalah seorang presiden.

Dalam teori retorika Aristoteles, penggunaan bahasa dikaitkan dengan pertimbangan tiga bukti retorik: *ethos*, *pathos* dan *logos*. *Ethos* mengacu

pada karakter yang dirasakan, kecerdasan, dan niat baik dari pembicara yang terungkap melalui bicaranya. *Ethos* mengandung unsur kredibilitas dari pembicara yang diperoleh karena mendapatkan hak untuk berbicara dengan kompetensi maupun kelayakan yang dimilikinya. *Pathos* berkaitan dengan pesan yang disampaikan dengan melibatkan emosi, seperti ketakutan, kemarahan, serta penghinaan, yang banyak digunakan melalui humor, sinisme, atau empati. Sedangkan *logos* adalah bukti logis yang disampaikan komunikator, yang mencakup argumen rasional. Dalam memaparkan bukti-bukti logisnya, pembicara sering kali menggunakan fakta dan angka untuk meyakinkan audiens (Samuel-Azran et al., dalam Dhia et al., 2024).

Bila disederhanakan, *Ethos* merujuk pada kredibilitas pembicara, *pathos* berkaitan dengan daya tarik emosional terhadap audiens, dan *logos* mengacu pada logika dan substansi argumen yang disampaikan (Varpio, 2018; Wrobel, 2018 dalam Isa, 2024).

Sementara itu, Gaya bahasa merupakan pilihan diksi atau kata yang dapat digunakan oleh penulis atau pembicara dalam mengungkapkan pikiran, ide-ide mereka melalui kata ataupun struktur kalimat (Ambarsari et al., 2024). Gaya Bahasa dapat menciptakan efek dan kesan tertentu kepada orang lain. Pilihan diksi, teknik retorika yang digunakan, sangat menentukan

pandangan orang lain terhadap gagasan yang disampaikan seseorang.

Gaya bahasa akan memperlihatkan bagaimana seseorang menyampaikan isi pikirannya, yang menjadi ciri khas orang tersebut. Karena itu, analisis gaya bahasa menjadi penting untuk melihat bagaimana seorang komunikator menggunakan kata-kata untuk memengaruhi pendengar atau orang lain. (Khairunnisa Syawiri et al., 2025) menyatakan bahwa gaya bahasa dijadikan sebagai kemampuan penyampaian gagasan seseorang dalam penggunaan kata, susunan kalimat, atau estetika kalimatnya. Gaya bahasa dalam pidato sangat berpengaruh karena gaya bahasa yang tepat mampu meningkatkan pemahaman serta memudahkan audiens dalam menangkap pesan utama yang disampaikan.

#### **Militeristik dan Bahasa Kekuasaan**

Sebagai sosok militer tulen, Prabowo berpotensi menanamkan budaya militerisme dalam pemerintahannya. Budaya militerisme mencakup kepatuhan, kedisiplinan, keseragaman, loyalitas, dan keterikatan terhadap atasan. Sedangkan budaya tentara adalah budaya otoriter yang didasarkan latar belakang kehidupan keras kombatan (combatan), kelompok orang yang boleh ikut dalam pertikaian bersenjata- termasuk kekerasan dan kejantanan (Widjaja dalam Kuswandari, 2005: 46)

Bila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka tipe kepemimpinan militeristik yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat begitu

otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana; menghendaki adanya kepatuhan yang mutlak dari bawahan; sangat menyenangkan suatu formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang terlalu berlebihan; menuntut adanya sebuah disiplin yang keras dan kaku dari para bawahannya; tidak menghendaki adanya saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya; dan komunikasi hanya dapat berlangsung searah (Adam, 2021; Fuji Antoro Putro et al., 2024).

Dalam kekuasaan, militerisme dapat disebarkan melalui bahasa. Keduanya memiliki hubungan yang kuat, sehingga mustahil untuk memikirkan kekuasaan tanpa mempertimbangkan bahasa (Chiluwa & Ruzaita, 2025). Argumentasi yang sama juga tertuang dalam penelitian berjudul "*U.S. Presidential Leadership and Crisis Rhetoric*" (2018). Penelitian itu menunjukkan adanya hubungan langsung antara kekuasaan dan persuasi dalam membentuk kepemimpinan presiden. Strategi retorika presiden akan menentukan seberapa persuasif presiden tersebut (McCabe, 2018)

Karena itu, topik penelitian ini penting karena selama ini isu militerisme selalu diidentikkan dengan persoalan institusi negara dan TNI. Isu tentang militeristik biasanya mengacu pada persoalan perang, musuh, dan pertahanan, dengan menggunakan bahasa yang mengandung ancaman dan kekerasan serta menimbulkan gaung emosional dan ideologis. Kenyataannya, isu militeristik juga bisa dilihat dari bahasa yang bekerja secara halus melalui persuasi simbolik dan

normalisasi wacana. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Prabowo telah melakukan praktik tersebut. Maka, retorika di sini bukan sekadar persoalan gaya bahasa, tetapi juga wacana persuasi untuk menormalisasi praktik militeris dalam pemerintahan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji retorika politik dalam pidato dan debat, khususnya terkait strategi persuasi dan konstruksi legitimasi politik (Isa, 2024; Mozefani et al., 2020). Penelitian lain juga menganalisis pidato Prabowo melalui pendekatan analisis wacana kritis dengan menyoroti tema-tema kebijakan serta hubungan antara latar belakang sosial dan teks pidato (Megawati, 2021; Wahyono et al., 2025). Namun, kajian tersebut belum secara khusus menyoroti penggunaan retorika militeristik sebagai strategi komunikasi politik dalam pidato seorang pemimpin dengan latar belakang militer.

Di sisi lain, penelitian mengenai militerisme dalam politik Indonesia lebih banyak berfokus pada hubungan sipil-militer dan dinamika kekuasaan institusional (Sukmawan & Pedrasan, 2022), bukan pada bagaimana militerisme direpresentasikan dan direproduksi melalui bahasa politik. Dengan demikian, kajian mengenai retorika militeristik dalam pidato politik masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks komunikasi kekuasaan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana retorika militeristik digunakan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto serta bagaimana retorika tersebut merepresentasikan konstruksi kekuasaan dalam komunikasi politik. Komunikasi politik di sini bukan ditujukan untuk meraih dukungan rakyat, melainkan untuk mendapatkan pengakuan dari para pejabat negara sebagai bagian dari konsolidasi politik di internal pemerintahan Prabowo.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan memandang retorika militeristik bukan sekadar sebagai gaya komunikasi politik, melainkan sebagai teknologi diskursif kekuasaan yang menormalisasi simbol-simbol militer dalam pemerintahan sipil. Dengan mengintegrasikan tiga tahapan seperti yang dijelaskan di atas, penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang masih minim dalam mengeksplorasi dimensi kebahasaan militerisasi dalam konteks pemerintahan di Indonesia.

Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana representasi nilai-nilai militeristik dalam pidato Prabowo? (2) Strategi retorika apa yang digunakan dalam pidato tersebut? (3) Bagaimana praktik wacana tersebut mencerminkan relasi kekuasaan dalam konteks sosial-politik?

Penelitian ini diharapkan dapat membedah nilai-nilai militeristik yang muncul dalam retorika Prabowo. Selain

itu, juga menganalisis gaya bahasa yang digunakan Prabowo serta bagaimana pidato Prabowo jika dilihat dari teori retorika Aristoteles. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat membedah aspek sosial dan politik yang memengaruhi isi retorika Prabowo.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) menurut model Norman Fairclough. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi : teks, discourse practice dan sociocultural practice. Teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik, dan tata bahasa. Dari sisi ini, analisis dilakukan dengan melihat tiga unsur, yakni representasi, relasi dan identitas.

Pada dimensi praktik wacana (*Discourse Practice*), analisis memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk melalui praktik diskursus yang menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Dimensi berikutnya adalah praktik sosial budaya (*Sociocultural Practice*). Pada tahapan ini, analisis didasarkan pada aspek situasional, institusional, dan sosial. Konteks situasional merupakan konteks sosial saat teks tersebut diproduksi. Aspek institusional melihat bagaimana institusi memengaruhi praktik produksi wacana. Sementara aspek sosial merupakan faktor makro yang berkaitan dengan masyarakat, seperti sistem politik, ekonomi, dan budaya

(Megawati, 2021)

Pendekatan metode Analisis Wacana Kritis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini. Metode ini mampu mengungkap dinamika kekuasaan. Kajian dalam Analisis Wacana Kritis (CDA) telah mengungkap dinamika kekuasaan yang terkait dengan bahasa, menganalisis bagaimana kekuasaan diberlakukan, direproduksi, dan dilawan, melalui teks atau ucapan (Van Dijk, 2001, dalam Giorgis et al., 2023)

Maka, unit analisis dalam pendekatan analisis wacana kritis ini adalah penggunaan kata, kalimat, dan paragraf dalam teks pidato Prabowo.

Analisis pidato Prabowo juga dilakukan dengan melihat penggunaan gaya bahasa. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada penggunaan kata, susunan kalimat, dan teknik tertentu dalam penyampaian pesan, dengan tujuan meyakinkan dan memengaruhi komunikan atau pendengar.

Pada tahapan berikutnya, pidato Prabowo akan dibedah menggunakan tiga pendekatan retorika Aristoteles, yakni ethos, pathos, dan logos.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan menyimpan teks pidato dari sumber resmi. Untuk video, peneliti mengacu pada tayangan di Kompas TV yang juga tersedia di Youtube. Sementara itu, teks pidato ini bersumber dari situs Sekretariat Negara.

Tahap berikutnya adalah observasi. Adler & Adler (1987) menyebutkan bahwa observasi

merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Bila didefinisikan, observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain (Morris, 1973 dalam Hasanah, 2017). Dalam hal ini, peneliti mengamati transkrip pidato Prabowo untuk mencari dan melihat unsur militeristik yang muncul. Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk memperkuat penjelasan atau analisis terhadap temuan penelitian. Teknik ini berfungsi untuk menjembatani antara temuan penelitian dan teori atau konsep yang relevan (Creswell, J.W., 2017).

Untuk memvalidasi data, peneliti menggunakan triangulasi teori. Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, untuk mengurangi ketidakjelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis. (Alfanyur & Mariyani, 2020, dalam Nurfajriani et al., 2024)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teori. Peneliti membandingkan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang dihasilkan, serta untuk meningkatkan kedalaman

pemahaman (Susanto et al., 2023). Dalam hal ini, ada tiga teori yang digunakan, yakni analisis wacana kritis, gaya bahasa dan retorika Aristoteles.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Wacana Kritis

Dalam pendekatan Norman Fairclough, ada tiga tahapan analisis yang harus dilakukan, yaitu teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Analisis teks bertujuan mengungkap makna melalui analisis bahasa secara kritis. Dari sisi ini, analisis dilakukan dengan melihat tiga unsur, yakni representasi, relasi dan identitas. Aspek representasi terbagi menjadi representasi dalam anak kalimat dan representasi gabungan atau rangkaian antanak kalimat. Pada representasi dalam anak kalimat, analisis terbagi menjadi kosakata dan tata bahasa.

### Analisis Teks

Pada aspek kosakata, dalam pidatonya, Prabowo banyak menggunakan kata persona, yakni "saya". Prabowo menggunakan kata 'saya' sebanyak 39 kali dalam pidatonya yang berdurasi 14 menit 50 detik. Kata 'saya' sebagai subjek umumnya diikuti predikat atau kata kerja yang merepresentasikan unsur otoritas dan kekuasaan. Seperti "ucapkan", "memilih", "mengajak", "jelaskan", "membawa" dan "instruksikan". Seperti terlihat pada kutipan pidato berikut ini :

*“Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini adalah bagian dari suatu wilayah perjuangan yang panjang”.*

Kata ‘saya’ pada teks pidato tersebut merupakan bentuk persona yang merepresentasikan bahwa Prabowo memiliki kekuasaan untuk menentukan tempat pelaksanaan retreat serta mengajak dan menjelaskan kepada para menteri. Kata persona ‘saya’ digunakan untuk meneguhkan diri serta posisi sebagai pelaku utama dalam sebuah kalimat (Kurniawan et al., 2024). Dua kalimat di atas memiliki dua partisipan aktor utama, yaitu ‘saya’ yang mewakili Prabowo sebagai presiden. Partisipan lain adalah “pimpinan pemerintah” dan “mereka” yang mewakili para menteri atau pejabat pemerintahan.

Contoh lain dari bentuk persona, seperti terlihat pada kutipan pidato berikut ini :

*“...Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan republik kita selama lima tahun ke depan. Saya membawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa...”*

Pada kalimat ini, terdapat dua kata “saya” yang juga merupakan bentuk persona yang merepresentasikan otoritas dan kapasitas Prabowo sebagai pemimpin dalam membawa para menterinya ke acara retreat di Lembah Tidar.

Selain bentuk persona, rangkaian kalimat tersebut juga mengandung

muatan ideologi tertentu. Pertama, ideologi kekuasaan yang diwakili oleh sang aktor dengan menggunakan kata (saya) yang menunjukkan posisi kekuasaan dan wewenang untuk mengajak serta memberi penjelasan kepada para menteri. Kedua, ideologi kontrol dan subordinasi yang dilakukan terhadap partisipan “pimpinan pemerintahan Republik Indonesia”, yakni para menteri atau kepala lembaga negara yang menjadi peserta retreat, ditempatkan dalam posisi subordinat, sehingga harus ikut serta dan tunduk pada arahan sang pemimpin.

Selain bentuk persona, unsur militeristik lainnya juga terlihat dari pemilihan kata, diksi, atau frasa yang digunakan Prabowo dalam pidatonya. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini:

*“Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Para kesatria adalah mereka yang sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Saudara-saudara, para taruna dan taruni memilih untuk masuk ke profesi kesatria, profesi pengabdian, dan profesi berbakti. Di ruangan ini, Saudara melihat gambar-gambar mereka yang telah berkorban jiwa dan raga agar kita bisa hidup merdeka. Saudara adalah harapan kita semua”.*

Simbol militeristik terlihat pada pilihan kata : “kesatria”, “hidup dalam pengorbanan”, “taruna taruni”, “profesi kesatria”, “profesi pengabdian”, “profesi berbakti”, “berkorban jiwa dan raga”, “hidup merdeka”. Pilihan kata atau istilah tersebut tentu bukanlah semata-mata teknis atau kebetulan belaka, melainkan mencerminkan

ideologi seseorang. Isi pidato di atas disampaikan Prabowo di hadapan para pembantu (menteri) di pemerintahannya. Prabowo memberi analogi hidup kesatria di Bukit Tidar sebagai profesi dan sikap yang harus ditiru para menterinya. Prabowo ingin mendeskripsikan bagaimana hidup sebagai seorang kesatria agar para menterinya bisa mengikuti dan menirunya.

Ideologi yang hendak ditanamkan adalah ideologi pengorbanan, pengabdian dan berbakti. Konsep pengorbanan memiliki kesamaan makna dengan altruism, yakni pandangan yang menekankan kewajiban manusia memberikan pengabdian, rasa cinta, dan tolong menolong terhadap sesama atau orang lain (Rahayu et al., 2019).

Ideologi berikutnya yang hendak ditanamkan adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menempatkan loyalitas tertinggi individu terhadap bangsa dan negaranya. Sebagai ideologi, nasionalisme berperan penting dalam membangun identitas kolektif, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap tanah air. (Zahro et al., 2025).

Sementara dalam hal kepemimpinan. Prabowo menempatkan dirinya sebagai aktor yang mengajak para pejabat negara yang hadir dalam kegiatan retreat untuk meniru para pahlawan, dengan menekankan ideologi kolektivisme. Yakni, tujuan

bernegara dapat diwujudkan melalui kerja sama, dengan mendahulukan kepentingan bersama, bukan kepentingan individualisme.

*“Saya membawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Dan, para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia”*

Kata atau frasa yang merepresentasikan ideologi militeristik dan nasionalisme terlihat pada kata “prajurit”, “semangat”, “disiplin”, “siap berkorban jiwa dan raga”, “untuk bangsa dan negara”, “untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia”. Teks pidato di atas juga menggambarkan para taruna militer sebagai sosok yang penuh semangat, disiplin, dan siap berkorban *jiwa dan raga demi bangsa dan negara*. Nilai-nilai itulah yang diharapkan Prabowo, sebagai pemimpin, dapat menular kepada para menteri-menterinya.

Ideologi berikutnya adalah kepatuhan dan loyalitas. Rangkaian kalimat pidato di atas menyiratkan keinginan Prabowo agar para menterinya loyal dan patuh kepadanya sebagai kepala pemerintahan, sama seperti sikap prajurit dalam dunia militer. Sikap itu ditunjukkan melalui kesiapan untuk memberi segalanya demi membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Simbol militeristik yang begitu kental ini, pada gilirannya, menggambarkan sikap glorifikasi terhadap militerisme. Glorifikasi itu juga terlihat pada teks berikut ini :

*“Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni dan saya bersyukur, saya beruntung, saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya. Ternyata, ada enam lulusan terbaik Adhi Makayasa di kabinet saya....”*

Teks pidato di atas menggambarkan bagaimana Prabowo melakukan “pemujaan” terhadap militer, khususnya lulusan terbaik dari akademi militer dan kepolisian. Hal itu tercermin dari pilihan frasa atau kalimat : “saya bersyukur”, “saya beruntung”, “saya mendapat alumni terbaik yang masuk kabinet saya”. Rasa bangga itu kemudian diekspresikan dengan memanggil nama-nama menteri yang berasal dari lulusan akademi militer dan kepolisian. Tak sekadar memanggil, para menteri itu diminta untuk berdiri.

Selain simbol militeristik, makna lain yang terkandung dalam teks pidato Prabowo adalah konsep kepemimpinan yang hendak dijalankan dalam pemerintahannya. Terkait hal ini, Prabowo justru meletakkannya di bagian akhir pidato. Namun, dalam rangkaian kalimat yang cukup panjang.

*“Jadi, kami bangga dengan Saudara-saudara sekalian. Penampilan Saudara tadi, saya lihat Saudara basah-basah, saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena asas kepemimpinan kita adalah ing ngarsa sung tulodo. Kalau anak buah basah*

*pimpinan harus basah, kalau anak buah kepanasan pimpinan harus kepanasan, kalau anak buah lapar pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita”*

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan kepemimpinan yang berasal dari nilai budaya Jawa, yakni *ing ngarsa sung tulodo*. Semboyan ini adalah konsep kepemimpinan yang dibangun oleh Ki Hadjar Dewantara (Sari et al., 2025). Ki hajar mempraktikkan konsep kepemimpinan ini dalam dunia pendidikan, khususnya guru.

Semboyan “ing ngarsa sung tulada” memiliki arti, di depan seseorang harus dapat memberi contoh. Artinya, seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik bagi pengikut maupun masyarakat, memberikan keselarasan antara perkataan dan perbuatan “*Practice what you preach* (Wardani et al., 2024).

Kutipan pidato memperlihatkan asas kepemimpinan yang ingin dibawa oleh Prabowo. Namun, konsep kepemimpinan ideal itu disampaikan dalam bingkai militer. Yaitu dengan menggunakan frasa “anak buah”. Anak buah memiliki arti : anggota kelompok (regu pasukan) yang berada di bawah seorang pemimpin. Istilah itu mengandung makna hubungan yang sangat struktural, membedakan kelas antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Dalam dunia militer, dikenal konsep komando, di mana bawahan harus mengikuti apa pun perintah atasannya.

Gaya kepemimpinan militeristik,

menurut Adam (2019) dan Yuliantingtyas (2024), mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik yaitu lebih banyak dalam menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat begitu otoriter, kaku dan seringkali untuk kurang bijaksana; menghendaki adanya kepatuhan yang mutlak dari bawahan; sangat menyenangkan suatu formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang terlalu berlebihan; menuntut adanya sebuah disiplin yang keras dan kaku dari para bawahannya; tidak menghendaki adanya saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya; dan komunikasi hanya dapat berlangsung searah.

Kepemimpinan militeristik juga terlihat pada kutipan berikut ini :

*“Pernah saya dengar waktu seorang jenderal bintang 1 gugur di daerah operasi, ada yang bertanya, “Kenapa seorang brigjen kok berada di daerah operasi di depan?” Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah, harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya, pemimpin harus berada di tengah anak buah”*

Di bagian ini, Prabowo kembali mengulang prinsip kepemimpinan militer dengan memberikan analogi.

Dengan teks seperti itu, Prabowo ingin memberikan pesan bahwa seorang pejabat negara harus mencontoh sikap jenderal tersebut.

Selanjutnya, frasa “selamat berjuang” yang disampaikan pada bagian akhir pidato identik dengan sapaan bagi militer yang berada di medan pertempuran. Terminologi militeristik ini sengaja dipilih untuk memberikan motivasi agar tetap semangat dalam menjalani aktivitas demi mencapai tujuan yang diharapkan.

#### **Analisis Tata Bahasa**

Dalam pidatonya, Prabowo beberapa kali menempatkan dirinya sebagai aktor utama yang menyebabkan sesuatu. Prabowo menampilkan tindakan (aktor sebagai penyebab), dengan sering menggunakan kata ‘saya’ untuk menunjukkan tindakan tertentu yang menyebabkan sesuatu pada partisipan lain (objek). Kata saya yang diikuti dengan predikat “memilih”, “mengajak”, “menjelaskan” menyebabkan sebuah tindakan yang harus diterima oleh objeknya, dalam hal ini partisipan dalam acara retreat.

Kalimat tersebut merupakan bentuk tindakan yang hendak dimunculkan oleh pembicara yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memilih, mengajak, dan menjelaskan kepada para menteri. Tindakan tersebut menggambarkan asimetri kekuasaan antara Prabowo sebagai pembicara dan para pejabat negara serta menteri sebagai pendengar. Hal ini juga

menggambarkan relasi hierarki antara pembicara dan pendengar. Kata “mengajak” menunjukkan tindakan atau permintaan dari pihak yang berkuasa, yakni Prabowo kepada para pejabat negara, termasuk para menteri.

Seperti terlihat dari kutipan pidato berikut ini :

*“Karena itu, sebagai presiden dan panglima tertinggi, saya instruksikan kepada Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian, karena sebagai presiden saya juga bisa memerintahkan kepolisian, kan? Bisa, kan. Gubernur empat akademi, beri libur untuk para taruna yang ikut tadi upacara”*

Kata ‘saya’ diikuti kata instruksi yang berakibat pada tindakan mengikuti instruksi yang harus dilakukan Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian. Kata ‘saya’ dalam kalimat tersebut merupakan penegasan dari Prabowo sebagai presiden dan panglima tertinggi. Hal itu disampaikan Prabowo secara jelas untuk menegaskan posisinya. Penegasan itu merupakan wujud dari kekuasaan yang dimiliki pembicara (Prabowo) terhadap pendengarnya, dalam hal ini para Gubernur Akmil semua angkatan dan Kepolisian.

### **Discourse Practice**

Pada bagian ini, analisis akan berfokus pada latar belakang Presiden Prabowo. Berbicara tentang sosok Prabowo, tidak akan bisa dilepaskan dari dunia militer. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di dunia militer.

Prabowo menyelesaikan sekolah menengah di berbagai negara seperti

Malaysia, Swiss, dan Inggris. Setelah itu, ia pulang ke Indonesia dan menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Magelang. Lulus pada tahun 1974. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat. (viva.co.id)

Latar belakang militer yang begitu kental itu turut memengaruhi keseharian sikap, retorika, hingga gaya berpakaian Prabowo. Gaya berpakaian ala militer itu sudah menjadi ciri khas Prabowo sejak pertama kali ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Gaya militeristik itu juga terlihat dalam kegiatan retreat. Dari pemilihan lokasi di Akademi Militer, pakaian yang digunakan peserta, hingga urutan acara bernuansa militer.

### **Sociocultural Practice**

#### **Situasional**

Pidato Prabowo ini disampaikan dalam pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih yang berlangsung selama 4 hari, 24-27 Oktober 2024. Retreat ini berlangsung hanya 3 hari setelah para menteri dan wakil menteri dilantik, yakni pada 21 Oktober 2024. Artinya, retreat ini berlangsung di tengah situasi ketika para menteri baru saja dilantik dan mulai bekerja. Selain itu, kabinet itu dilantik hanya sehari setelah Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dalam sejarah ketatanegaraan, baru kali ini kabinet langsung dilantik sehari setelah presiden dilantik. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin kabinetnya segera bekerja. Prabowo segera ingin merealisasikan janji-janji

politiknya semasa kampanye.

Sebelumnya, setelah pelantikan dirinya sebagai Presiden di Gedung MPR/DPR pada 20 Oktober, Prabowo melalui Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran juga menggelar pesta panggung rakyat. Acara itu digelar di sepanjang Jl. Jenderal Besar Sudirman sampai ke Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Dalam pesta rakyat itu juga terdapat tujuh panggung hiburan di sepanjang Jalan Sudirman hingga ke Monas. Ribuan warga memenuhi sepanjang jalan Sudirman-Thamrin saat Prabowo melintas dari Gedung DPR/MPR di Senayan menuju Istana Negara. (Nasrullah, 2024)

Dengan suasana gegap gempita seperti itu, rakyat Indonesia tengah mengalami masa euforia menyambut pemimpin baru. Rentetan peristiwa hingga ke retreat itu berlangsung saat sebagian besar masyarakat menaruh harapan besar pada Prabowo untuk merealisasikan janji-janji politiknya.

Selain euforia kemenangan, saat Prabowo dinyatakan resmi oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo juga memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Saat pilpres digelar, kekuatan politik masih terbagi di beberapa kandidat presiden. Namun, setelah itu, sejumlah partai yang tadinya tidak mendukung Prabowo akhirnya merapat dan memberi dukungan. Dengan peta politik seperti itu, Prabowo berada dalam posisi yang sangat kuat secara politik di tengah

resistensi sebagian masyarakat terhadap penggunaan simbol-simbol militer.

### Institusional

Penjabaran aspek institusional dalam penelitian ini dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, yakni sistem presidensial.

Sistem presidensial di Indonesia terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” (Mohammad Haris Taufiqur Rahman, 2024)

Dalam sistem ini, kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*). Atas kekuasaan yang luas itu, presiden menjadi pihak yang “tidak terjamah” (*untouchable*) oleh aturan hukum dikarenakan tidak terdapatnya lembaga kontrol yang secara khusus mengatur tentang tindak-tanduk presiden di dalam menjalankan tugasnya (Budiman, 2017)

Dalam sistem pemerintahan presidensial, titik berat kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*) (Kelmaskosu & Rauta, 2025).

Selanjutnya, sebagai kepala negara, Presiden juga bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan

Bersenjata (*Chief of the Armed Forces*). Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Kekuasaan tertinggi Presiden atas angkatan bersenjata bermakna pula bahwa Presiden berkedudukan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata (Bastari & Sujono, 2025).

Dengan kekuasaan yang luas itulah, seorang presiden memiliki kemampuan untuk membangun wacana sesuai dengan yang dikehendakannya. Dengan sumber daya itu, presiden bahkan memiliki keleluasaan untuk menciptakan dan menormalisasi ideologi agar dianggap sah dan diterima oleh warga negara (publik).

### **Sosial**

Dalam penelitian ini, aspek sosial ditinjau dari bagaimana ideologi militeristik diadopsi oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian, nilai-nilai militeristik itu diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, yang harus diterima bahkan oleh sebagian masyarakat, dan dianggap memiliki kebaikan serta keunggulan.

Ideologi ini sudah tumbuh pada masa Orde Baru, yang kemudian dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan. Indonesia pada masa itu berada di bawah pemerintahan militer yang sentralistik, hegemonik, dan represif. Militer tidak hanya tinggal di barak, tetapi juga terlibat dalam politik pemerintahan. Bahkan militer bisa memasuki wilayah ekonomi, sosial dan budaya. Peran militer itu ditandai

dengan adanya konsep Dwi Fungsi ABRI (Umra, 2019).

Namun, nyatanya, runtuhnya Orde Baru tidak menghilangkan peran militer dalam kehidupan sosial politik. Aroma militeristik semakin kental di masa pemerintahan Joko Widodo, orang sipil yang awalnya diharapkan menjadi pendorong demokratisasi, yang terpilih sebagai presiden pada 2014 dan bertahan hingga 2024. Di masa pemerintahannya, militerisme lahir dalam bentuk yang disebut “kontrol sipil pragmatis”.

Istilah ini merupakan kebalikan dari kontrol sipil subjektif yang menekankan agar militer kembali ke masyarakat dan bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Serta kontrol sipil yang objektif, yang menekankan diferensiasi (pemisahan/pembedaan) yang jelas antara ranah militer dan ranah sosial politik. Dalam kontrol sipil yang objektif, militer diharapkan berkembang menjadi organisasi yang “profesional”. Dalam kontrol sipil pragmatis, perubahan sosial yang terjadi secara konstan di masyarakat akan memaksa organisasi (termasuk militer) untuk bersikap pragmatis dengan beradaptasi dan berkompromi terhadap perubahan tersebut. (Sukmawan & Pedrason, 2022)

Dalam pragmatisme, militer, baik secara institusional maupun individu (personel, perwira, dan purnawirawan), dapat berperan dalam politik. Di masa pemerintahan Joko Widodo, hal itu bisa dilihat dari 3 hal, yaitu: keterlibatan purnawirawan TNI/Polri dalam politik partisan dan kampanye politik, pengisian jabatan publik oleh

puanawirawan TNI/Polri, dan berkembangnya militerisme di kalangan masyarakat sipil. (Sukmawan & Pedrason, 2022).

Militerisme yang mendapat tempat di era Jokowi tak lepas dari keberadaan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Salah satu program yang mendapat perhatian luas adalah program Bela Negara yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Tak hanya itu, pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Pertahanan juga meluncurkan program Komponen Cadangan, atau "Komcad," pada tahun 2021. Keterlibatan militer lainnya yang terjadi pada era Jokowi adalah mengelola lahan terbengkalai menjadi area pertanian, yang disebut food estate.

Ideologi militerisme semakin mendapat tempat setelah Prabowo menang dalam Pilpres 2024 dan dilantik menjadi presiden. Prabowo semakin memperluas peran TNI di wilayah sipil. Salah satunya adalah pengesahan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) yang berlangsung di tengah protes massa.

Ada 3 substansi dalam RUU ini yang kontroversial dan mendapat protes dari berbagai kalangan, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Koalisi RSK). **Pertama**, menambah cakupan tugas pokok TNI terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dari 14 menjadi 16. Dan 2 tugas yang ditambahkan mengenai pertahanan

siber, melindungi, serta menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. **Kedua**, perluasan penempatan TNI di kementerian/lembaga. **Ketiga**, penambahan masa dinas keprajuritan.

Selain itu, revisi UU TNI juga membuka peluang pelibatan dan mobilisasi TNI dalam menjalankan program-program Pemerintahan Prabowo dalam urusan sipil dan domestik, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji (Mohammad, 2025).

### Analisis Gaya Bahasa

Dari teks pidato tersebut, ditemukan delapan gaya bahasa yang digunakan Prabowo dalam pidatonya. Gaya bahasa tersebut adalah repetisi, alegori, hiperbola, personifikasi, paralelisme, ironi, klimaks dan metafora. Gaya Bahasa repetisi atau pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama digunakan untuk memberikan penekanan pada satu isu tertentu (Ambarsari et al., 2024) Misalnya terlihat pada teks pidato berikut:

*"Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni dan saya bersyukur, saya beruntung, saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya"*

Repetisi pada kalimat tersebut terdapat pada kata "bersyukur" dan "beruntung". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa alumni Akademi Militer yang saat ini duduk di kursi kabinet adalah orang-orang terbaik. Karena itu, ia merasa beruntung.

Gaya bahasa berikutnya adalah penggunaan gaya paralelisme, seperti terlihat pada kutipan pidato berikut ini:

*“Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah; kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan; kalau anak buah lapar, pimpinan harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita.*

Kalimat tersebut menggambarkan pola kalimat yang sama. Pesan dari kalimat tersebut adalah asas kepemimpinan yang akan dibangun Prabowo dalam pemerintahannya. Dengan gaya bahasa paralelisme ini, Prabowo berusaha memberi penekanan melalui pengulangan atau repetisi pada kata "basah", "kepanasan", dan "lapar". Tiga kata sifat tersebut harus sama-sama dirasakan oleh pemimpin dan anak buah. Gaya bahasa paralelisme ini membuat pesan yang ingin disampaikan mudah diingat oleh pendengar.

Gaya bahasa berikutnya adalah ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang bermaksud untuk mengungkapkan kebalikan dari apa yang sebenarnya dimaksudkan (Ambarsari et al., 2024) Seperti terlihat dari pidato Prabowo adalah :

*“Karena itu, sebagai presiden dan panglima tertinggi, saya instruksikan kepada Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian, karena*

*sebagai presiden saya juga bisa memerintahkan kepolisian, kan? Bisa kan”*

Kalimat tersebut merupakan contoh ironi karena Prabowo, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sudah tentu memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi kepada Gubernur Akmil dan Kepolisian.

Contoh kalimat berikutnya dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa klimaks. Seperti terlihat pada teks berikut:

*“Kenapa seorang brigjen bisa berada di daerah operasi di depan?” Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah, maka harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya, pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah”*

Kalimat ini juga memperlihatkan urutan informasi dari yang umum ke yang khusus yang menjadi pesan penting dari urutan kalimat tersebut. Di awal, Prabowo membukanya dengan kalimat tanya tentang seorang brigjen yang berada di garis depan operasi. Kemudian, kalimat berikutnya merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut, yakni mengenai konsep kepemimpinan. Di kalimat berikutnya, yang menjadi inti adalah bahwa konsep kepemimpinan yang ingin disampaikan Prabowo adalah bahwa pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah.

Dengan mengurutkan rangkaian kalimat tersebut, Prabowo berusaha menciptakan efek dramatis, sehingga

para menterinya dapat memahami dan mengikuti sikap pemimpin seperti itu. Pesan ini disampaikan dengan adanya repetisi pada kata “dipikul”, “bahaya”, “pemimpin” dan “anak buah”.

Gaya bahasa berikutnya adalah metafora, yakni gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata-kata pembanding (Ambarsari et al., 2024). Contohnya seperti terlihat dari teks pidato berikut ini:

*“Para kesatria adalah mereka yang sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Saudara-saudara para taruna dan taruni memilih masuk profesi kesatria, profesi pengabdian, profesi berbakti”*

Kalimat tersebut membandingkan kesatria, yaitu taruna-taruni, dengan pengorbanan dan pengabdian. Prabowo menggunakan metafora profesi pengabdian dan berbakti, serta pengorbanan, sebagai profesi yang dipilih oleh taruna-taruni akademi militer. Karena itulah, mereka layak disebut kesatria.

Pemaknaan terhadap gaya bahasa yang digunakan Prabowo tersebut menggambarkan glorifikasi terhadap militerisme, termasuk sifat kepemimpinan kolektivisme yang hendak dibangun, dengan menjadikan sikap seorang jenderal sebagai contoh.

#### **Analisis Retorika Aristoteles**

Pidato Prabowo memenuhi aspek retorika menurut pendekatan ethos, pathos, dan logos Aristoteles. Aspek ethos terdapat pada bagian pengantar

yang bertujuan untuk menumbuhkan kredibilitas komunikator. Contohnya Ketika Prabowo menyampaikan ucapan rasa hormat, terima kasih dan pujian kepada pendengar. Kalimat pidato Prabowo tergolong dalam kategori *karakter mulia*. Yakni karakter dengan citra pembicara sebagai pribadi yang baik dan jujur. Untuk membangun kepercayaan, pembicara memulai dengan berbagi pengalaman dan nilai-nilai pembicara. Sebagai orang yang pernah dididik di Lembah Tidar dan memiliki latar belakang militer yang panjang, Prabowo merasa memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk menceritakan sejarah Lembah Tidar. Karena itu, dalam pidatonya, Prabowo banyak menyinggung sejarah nilai-nilai yang terkait dengan Lembah Tidar.

Dari sisi penampilan, saat pidato, Prabowo mengenakan seragam loreng Komponen Cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna hijau. Di lengan sebelah kiri, terdapat atribut tempel bergambar Garuda. Sedangkan di lengan sebelah kanan, terdapat atribut tempel bergambar bendera Merah Putih. Dengan seragam ini, Prabowo ingin membangun kesan dirinya sebagai seorang tentara, serta membangun sikap disiplin dan cinta pada bangsa dan negara.



Gambar 1. Seragam Yang Dikenakan Prabowo (Sumber: Kompas TV, 2025)

Pathos berkaitan dengan perasaan atau emosi. Dalam retorika, seorang komunikator dapat memengaruhi audiens dengan menyampaikan pesan yang melibatkan emosi, seperti rasa senang, marah, bangga, empati, dan perasaan lainnya. Dalam pidato Prabowo, terlihat banyak bagian yang dapat memancing emosi audiens.

Isi pidato tersebut menggambarkan bahwa Prabowo berusaha membangkitkan semangat atau motivasi pada audiensnya. Prabowo menjadikan sikap disiplin seorang prajurit sebagai contoh yang harus ditiru oleh para pejabatnya. Kemudian, Prabowo mengharapkan para menteri memiliki sikap yang rela membela rakyat. Isi pidato itu juga memperlihatkan aspek emosi, kepercayaan atau keyakinan. Pidato tersebut juga menggambarkan bahwa Prabowo ingin membangkitkan semangat dan jiwa nasionalisme. Prabowo kembali menjadikan taruna dan taruni yang disebutnya sebagai kesatria sebagai contoh orang-orang yang memiliki sikap rela berkorban jiwa dan raga. Ini adalah bentuk pesan keyakinan dan harapan dari komunikator kepada audiensnya.

Aspek logos adalah kemampuan komunikator dalam membangun argumen yang rasional agar pesan dapat diterima dan memengaruhi audiens. Dalam pidatonya, pesan penting yang ingin disampaikan Prabowo kepada para pejabat di pemerintahannya adalah konsep kepemimpinan. Rangkaian kalimat pidato tersebut menunjukkan bahwa Prabowo menginginkan agar pejabat di pemerintahannya menerapkan kepemimpinan yang inklusif. Yakni kepemimpinan yang dekat dengan bawahannya, tidak ada sekat antara atasan dan bawahan, serta pemimpin yang harus berada di paling depan dalam menerima tugas dan tanggung jawab. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, Prabowo menjadikan kehidupan di dunia militer sebagai contoh atau analogi.

### Aspek Militeristik dan Kekuasaan

Sejumlah temuan penelitian di atas menggambarkan beberapa hal penting yang menjadi pokok bahasan. **Pertama**, pilihan kata, frasa, kalimat, hingga gaya bahasa Prabowo menggambarkan karakter Prabowo sebagai seorang militer. Hal itu terlihat dari dominasi penggunaan kata ganti “saya” dalam teks. Kata ganti orang, atau yang biasa disebut pronomina persona.

Pronomina persona adalah pronomina yang dapat digunakan untuk mengacu pada orang. Pronomina persona dapat mengacu pada diri sendiri (pronomina persona pertama), mengacu pada orang yang diajak bicara (pronomina persona kedua), atau mengacu pada orang yang dibicarakan

(pronomina persona ketiga) (Alwi dkk dalam Nahak & Dapubeang, 2020)

Dalam pidato ini, kata ganti yang digunakan Prabowo adalah orang pertama tunggal, yakni “saya” untuk menyebut diri sendiri. Penggunaan kata "saya" tersebut merupakan bentuk penegasan diri serta posisi sebagai pelaku utama. Kata ganti tunggal tersebut kemudian diikuti dengan predikat atau kata kerja yang merepresentasikan otoritas atau kekuasaan. Selanjutnya, hal ini diperkuat lagi melalui penonjolan kata atau istilah dalam dunia militer pada setiap kalimat yang disampaikan. Dari mulai “kesatria”, “pengorbanan”, “perjuangan”, “berbakti”, “prajurit”, “taruna”, “jenderal” hingga “anak buah”.

Pemilihan kata dan penggunaan bahasa sesungguhnya bukan sekadar keputusan yang bersifat teknis atau ketidaksengajaan semata, tetapi tetap menggambarkan karakter yang terbentuk dari latar belakang atau asal-usul seseorang. Dalam kajian bahasa, Lantolf & Poehner (2018) mengatakan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai kode untuk mentransmisikan pesan, tetapi juga sebagai media refleksi pikiran, norma sosial, dan praktik budaya yang berkembang secara dinamis. Bahasa merupakan indikator utama identitas sosial (Indrayanti et al., 2025).

Penonjolan persona dan diksi militeristik itu merupakan strategi diskursif untuk memperkuat

kepemimpinan dan kekuasaan yang ingin diperlihatkan Prabowo di depan para “pembantu”nya. Sebuah strategi yang mudah dipahami karena pidato tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah Prabowo dilantik sebagai presiden. Prabowo merasa perlu memperkuat legitimasi kekuasaannya, tidak hanya di hadapan para menteri, tetapi juga para pimpinan tertinggi TNI dari semua matra. Sebagai seorang pemimpin yang membawahi para menteri dengan latar belakang partai dan kepentingan yang beragam, retorika Prabowo mencerminkan keinginan untuk memperkuat posisi politik dan meningkatkan legitimasi pemerintahan.

Pilihan strategi diskursif tersebut merepresentasikan ideologi militerisme dan nasionalisme yang kuat. Namun, pada gilirannya juga membawa ideologi kontrol dan subordinasi. Subordinasi menggambarkan adanya hubungan atasan-bawahan, terutama dalam konteks militer (KBBI, 2026). Dalam hal ini, subordinasi terhadap para menteri atau kepala lembaga negara yang menjadi peserta retreat, yang harus ikut serta dan tunduk pada arahan sang pemimpin. Pada gilirannya melahirkan ideologi kepatuhan dan loyalitas.

Hal itu merupakan cermin kepemimpinan militer. Kepemimpinan tipe ini banyak menggunakan sistem perintah, yaitu sistem komando dari atasan ke bawahan yang bersifat keras, sangat otoriter, dan mengharapkan bawahan untuk selalu patuh. (Kartono dalam Mattayang, 2019)

Bahasan kedua adalah adanya kontradiksi wacana terkait kepemimpinan yang ingin dibentuk dalam pemerintahan. Dalam pidatonya, Prabowo mengutip kepemimpinan *Ing ngarsa sung tulada* yang bermakna “memberikan teladan atau contoh di depan”. Hal itu digambarkan dengan contoh: jika seorang anak buah basah, kepanasan, dan lapar, maka seorang jenderal juga harus ikut merasakan hal yang sama. Ini menggambarkan kepemimpinan kolektif yang mencerminkan kesetaraan. Namun, pilihan frasa “anak buah” tak bisa menghilangkan makna bahwa yang lebih menonjol di sini adalah kepemimpinan militeristik, yang membedakan kelas antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Dalam dunia militer, dikenal konsep komando, di mana bawahan harus menuruti setiap perintah atasannya.

Strategi diskursif ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari apa yang Fairclough (2013) sebut sebagai “democratization of discourse”, yaitu kecenderungan untuk mengurangi marker kekuasaan yang eksplisit dalam wacana publik. Namun, demokratisasi wacana tidak selalu mencerminkan demokratisasi kekuasaan yang sesungguhnya. Dengan bahasa lain, hal ini mencerminkan apa yang Fairclough dalam Ruth Wodak (2019) sebut sebagai relasi kekuasaan dalam wacana yang sering kali bersifat asimetris, namun tersamarkan melalui strategi linguistik tertentu (Rumaf et al., 2025).

Dalam pidatonya, Prabowo seolah-olah ingin dikesankan membangun

kepemimpinan yang kolektif dan inklusif, tetapi sesungguhnya ingin menutup kesan militeristik yang dianggapnya kurang baik.

Dalam perspektif kekuasaan dan diskursus yang dikemukakan Michel Foucault, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme produksi pengetahuan dan normalisasi nilai dalam masyarakat. Melalui diskursus politik, nilai tertentu dapat direpresentasikan sebagai sesuatu yang wajar dan sah dalam praktik kekuasaan.

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang relasional dan mengandaikan relasi dalam diri manusia. Kekuasaan tidak bertujuan untuk menguasai atau menundukkan yang satu atau yang lain, melainkan menyebar dan terkadang tidak disadari oleh objek kekuasaan tersebut. (Barasa & Riyanto, 2023). Pada praktiknya, kekuasaan dapat bekerja melalui bahasa yang digunakan dalam interaksi antarmanusia. Dengan demikian, penggunaan retorika militeristik dalam pidato Prabowo dapat dipahami sebagai strategi diskursif yang berkontribusi dalam menormalisasi nilai-nilai militer.

Penerapan nilai-nilai militer, di satu sisi, memang membawa manfaat positif. Seperti pada tumbuhnya sikap loyalitas, stabilitas, solidaritas dan patriotisme. Sikap-sikap tersebut tentu dibutuhkan dalam mengelola pemerintahan di sebuah negara yang besar dan luas seperti Indonesia. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran akan munculnya sikap otoriter.

Otoritarianisme itu bisa terjadi jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Kritik terhadap pendekatan ini mencakup kekhawatiran bahwa struktur kabinet menjadi terlalu terpusat pada keputusan presiden, yang dapat mengurangi otonomi para menteri dalam melaksanakan tugas mereka (Afza Camila & Rusliawan, 2024)

### Glorifikasi Militerisme

Bahasan kedua tersebut berkelindan dengan bahasan ketiga, yakni glorifikasi terhadap profesi militer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, glorifikasi adalah proses, cara, atau perbuatan meluhurkan, memuliakan, dan sebagainya (2016). Kata glorifikasi merupakan padanan dari bahasa Inggris *glorification* yang memiliki kata asal *glorify* yang di dalam kamus Oxford memiliki makna (1) *exalt to heavenly glory*; *make glorious* ‘memuliakan hingga keagungan surgawi: membuat agung’; (2) *transform into something more splendid* ‘mengubah menjadi sesuatu yang lebih hebat’; (3) *extol; praise*, ‘mendewakan: mengagungkan’; (4) *seeming or pretending to be more splendid than in reality* ‘tampak atau berpura-pura menjadi lebih hebat daripada kenyataan’ (Upartini, 2020).

Glorifikasi terlihat dari pilihan diksi/kata dan frasa yang berkaitan dengan dunia militer. Selain itu, sikap seorang taruna dan kehidupan militer juga menjadi contoh kehidupan yang harus ditiru oleh para menteri. Pemberian apresiasi kepada menteri

yang memiliki latar belakang militer. Serta kepemimpinan militer yang ditonjolkan. Glorifikasi terhadap militer juga terlihat dari pemilihan lokasi kegiatan di Akademi Militer, Magelang, pakaian/seragam yang digunakan peserta yang berbau militer, hingga materi acara yang dikemas menyerupai pendidikan militer.

Dalam artikel *Militarization matters: rhetorical resonances and market militarism* (Leander, 2024), retorika dipandang sebagai praktik diskursif yang menghasilkan makna, emosi, dan legitimasi sosial, terutama dalam membingkai militerisasi sebagai sesuatu yang rasional, perlu, dan wajar. Dengan demikian, aspek militeristik tidak harus bekerja dengan mengangkat senjata melalui peperangan, melainkan berlangsung melalui praktik bahasa yang memiliki dampak sangat kuat dalam mempersuasi audiens.

Kecenderungan Prabowo yang semakin militeristik ini juga terjadi karena publik semakin menerima keberadaan militer. Masyarakat menganggap bahwa militer sangat dibutuhkan karena memiliki keunggulan dibandingkan warga sipil. Hal itu setidaknya tercermin dari hasil survei Litbang Kompas pada Maret 2025. Saat ditanyakan kepada responden apakah demokrasi akan terganggu ketika TNI masuk ke institusi sipil. Ada 46,8 persen responden yang menyebut terganggu, sedangkan 49,7 persen tidak terganggu, dan sisanya 3,5 persen tidak tahu (Wiryo & Carina, 2025).

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan dominannya nilai-nilai militeristik dalam retorika Prabowo Subianto pada kegiatan retreat Kabinet Merah Putih. Hal tersebut terlihat pada pilihan kata, frasa, istilah, dan gaya bahasa yang digunakan. Misalnya, penggunaan kata 'saya' sebagai kata ganti orang pertama tunggal yang menggambarkan peneguhan diri sebagai pelaku utama yang memiliki otoritas dan kekuasaan.

Analisis teks juga memperlihatkan ideologi kekuasaan dan kepemimpinan militeristik yang ingin diterapkan oleh Prabowo. Ideologi lainnya yang terlihat adalah nasionalisme, di mana Prabowo ingin menanamkan sikap disiplin, semangat, dan kesediaan untuk mengorbankan jiwa dan raga demi mencapai tujuan negara. Strategi diskursif dimunculkan untuk menumbuhkan kepatuhan dan loyalitas bawahan terhadap atasan, serta glorifikasi terhadap militer.

Retorika yang mengusung semangat nasionalisme dan kolektivisme, merupakan strategi diskursif Prabowo untuk memperlihatkan "*democratization of discourse*". Namun, hal itu dibungkus dengan kemasan yang penuh simbol militeristik, sehingga yang terlihat justru ideologi ketidaksetaraan atau subordinasi, serta kepatuhan dan loyalitas bawahan kepada atasan.

Retorika yang diperlihatkan Prabowo ini menegaskan penjelasan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga representasi identitas dan karakter orang yang menyampaikan. Hal itu menegaskan

bahwa bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk mengomunikasikan ideologi guna meneguhkan kekuasaan.

Melalui pidatonya, Prabowo tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga berusaha membangkitkan semangat para bawahannya, membangun loyalitas, serta melakukan konsolidasi demi kekompakan. Prabowo juga berusaha membangun kerangka pemahaman tertentu tentang model kepemimpinan dan peran negara yang dianggap ideal. Oleh karena itu, penggunaan teks, gaya bahasa dan narasi dalam pidato politik memiliki dimensi ideologis yang penting dalam komunikasi kekuasaan.

Dalam perspektif Foucault, penggunaan bahasa semacam ini dapat berfungsi sebagai mekanisme normalisasi, yaitu proses di mana nilai-nilai tertentu secara bertahap diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial. Dalam jangka panjang, diskursus semacam ini berpotensi menormalisasi nilai-nilai militer dalam ruang pemerintahan sipil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa retorika politik tidak hanya berfungsi sebagai alat persuasi, tetapi juga sebagai mekanisme diskursif terkait kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam konteks komunikasi politik, penggunaan retorika militeristik dapat berkontribusi dalam membangun legitimasi kekuasaan dan membentuk orientasi ideologis di ruang publik.

## Referensi

Afza Camila, L., & Rusliawan, S. (2024). *Dinamika Psikologis dalam Pembentukan Kabinet Merah Putih: Analisis dari Lembah Tidar*

- (Psychological Dynamics in the Formation of the Red and White Cabinet: Analysis from the Tidar Valley). *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, (November), 8670–8675. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Ambarsari, C. F., Gizka, A. F., Zerlinda, N., Namira, S. M. P., Maulidya, E. P. G., & Arum, D. P. (2024). Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Politik: Variasi Gaya Bahasa Calon Presiden Dalam Debat Pertama Pilpres 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 5702–5720.
- Barasa, M., & Riyanto, F. X. A. (2023). Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 188–195. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1785>
- Bastari, R., & Sujono, S. (2025). Analisis Pasal 10, 11, dan 12 Undang-undang Dasar 1945 terkait kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara terhadap Tentara Nasional Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 283–294.
- Budiman, M. (2017). *Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. vol. 19. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/5>
- Chiluwa, I., & Ruzaita, J. (2025). Analyzing the language of political conflict: a study of war rhetoric of Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky. *Critical Discourse Studies*, 22(5), 477–493. <https://doi.org/10.1080/17405904.2024.2331186>
- Creswell J.W. (2017). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dhia, R. N., Pramesthi, J. A., & Irwansyah, I. (2024). Analisis Retorika Aristoteles Pada Kajian Ilmiah Media Sosial Dalam Mempersuasi Publik. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 81–103. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v4i1.3530>
- Fikri, A. (2020). Pidato Ismail Haniyah untuk Umat Islam Indonesia. *Journal AL-AZHAR Indonesia Seri Humaniora*, 5(3), 137–145. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/387>
- Fuji Antoro Putro, Solikhah Yuliatiningtyas, P.Hd, & Dr. Tony S. Soekrani, M.Si. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Komando Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Tingkat Kinerja Bawahan Di Seksi Sim Ditlantas Polda Jatim. *Jurnal*

- Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 10(2), 136–144. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i2.1082>
- Giorgis, P., Semenets, O., & Todorova, B. (2023). “We are at war”: The military rhetoric of COVID-19 in a cross-cultural perspective of discourses. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 6. <https://doi.org/10.3389/frai.2023.978096>
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Adam, I. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Kinerja Personel Komando Daerah Militer (Kodam). *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1), 73–87. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afghani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–833.
- Indrayanti, T., Rakhmawati, A., & Saddhono, K. (2025). Mengungkap kekuatan retorika dalam pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump” (Analisis wacana kritis Fairclough). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(3), 741–754. <https://www.diglosiaunmul.com/index.php/diglosia/article/view/1360>
- Isa, A. (2024). Retorika Prabowo Subianto dalam Debat Pertama Pemilihan Presiden 2024. *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 16(2), 143–167. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.5492>
- Kasma, N., Hanafi, M., Aswadi, & Kasman, R. (2025). Bahasa dan Politik dalam Wacana Global: Analisis Kritis P. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 16–18.
- Kelmaskosu, K., & Rauta, U. (2025). *Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial (The President’s Power in Forming the Cabinet According to the Presidential System): tidak adanya pembatasan jumlah tersebut melenceng dari sistem pemerintahan presidensial*. 8(1), 10–11.
- Khairunnisa Syawiri, N., Biru Unggul Alththabaran, B., Saputri, J., Oktaviani, F., Hakim, A., & Studi Psikologi, P. (2025). *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Gaya Bahasa Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Pelantikan Presiden*. 1(2), 15–25. [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)
- Kurniawan, V., Widjajanti, A., & Sukatman. (2024). Pidato pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-X: Kajian wacana kritis menurut Norman Fairclough. *Lingua*

- Skolastika*, 3(2), 224–240.  
<https://lingua.jurnal.unej.ac.id/index.php/LF/article/view/51158/15462>
- Kuswandari, A. (2005). *Bahasa militer dalam komunikasi politik SBY (Tesis, Universitas Indonesia, FISIP, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi)*.
- Leander, A. (2024). Militarization matters: rhetorical resonances and market militarism. *Critical Military Studies*, 10(2), 147–170. <https://doi.org/10.1080/23337486.2022.2081300>
- Maqfirah, H., M. N., & Asriani. (2025). Analisis Perubahan Strategi Komunikasi Politik Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 dan 2024. *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 3(1), 20–28.
- Mason, J., & Holland, S. (2020). *Trump says he will invoke the wartime act to fight the “enemy” coronavirus*. <https://www.reuters.com/article/world/us-politics/trump-says-he-will-invoke-wartime-act-to-fight-enemy-coronavirus-idUSKBN2152XK/>
- Mattayang, B. (2019). Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis, Volume 2, N(4)*, 1–8. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/247>
- McCabe, R. (2018). *U . S . Presidential Leadership and Crisis Rhetoric: The Honors Program Senior Capstone Project Student Name : Robert McCabe Faculty Sponsor : Richard Holtzman May 2018. (May)*.
- Megawati, E. (2021). ANALISIS WACANA KRITIS MODEL FAIRCLOUGH DAN WODAK PADA PIDATO PRABOWO (Critical Discourse Analysis of Fairclough’s and Wodak’s Model Within Prabowo’s Speech). *Kandai*, 17(1), 75. <https://doi.org/10.26499/jk.v17i1.1551>
- Mohammad. (2025). *Kembalinya Dwifungsi TNI dan Corak Militeristik dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran*.
- Mohammad Haris Taufiqur Rahman. (2024). *Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia. Constitution Journal Volume 3 Number 1 June 2024*. 41–62.
- Nahak, K. B., & Dapubeang, A. R. A. P. (2020). Bentuk Sapaan Pronomina Persona Bahasa Tetun Dialek Fehan Address Form of Pronomina Persona in Tetun Language Fehan Dialect. *Jurnal Bahasa Indonesia*, 05(1). <https://doi.org/10.32938/jbi.v5i1>
- Nasrullah, A. (2024). *Pesta Rakyat Saat Pelantikan Prabowo-Gibran Hadirkan Konser dan Bazar UMKM*.
- Rahayu, P., Adelina, F., Kamal, S., Widayanto, W. N., & Hadi, C. (2019). Belas kasih diri (self-compassion) dan pengorbanan

- (altruism) pada suku Tengger. *Fenomena*, 28(1), 30–38. <https://doi.org/10.30996/fn.v28i1.2443>
- Rumaf, N., Dadang S. Anshori, V. S. Damaianti, Andoyo Sastromiharjo, & Siti Fatihaturrahmah Al Jumroh. (2025). Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 11(2), 2111–2124. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i2.5790>
- Sari, P., Sabatini, S., Darwin, & Sinaga, O. (2025). Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani: Nilai Kepemimpinan Etnik Jawa Dan Relevansinya Dengan Tren Perkembangan Masa . *GENTA MULIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 380–388.
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274–289. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Triyogo, W., Suwiknyo, E., Al Hosen, M. Z., & Saptawan, E. (2023). Dalam Bayang-bayang Maskulinitas: Studi Kasus Branding Politik Prabowo Subianto, *Jurnal Komunikasi Profesional*, Vol. 7, No. 4, hlm. 644 – 660.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme, Atau Militerisasi Warga Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 164–178. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art9>
- Upartini, D. P. (2020). Formula Glorifikasi Pemimpin Dalam Hikayat Banjar. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 9(2), 147–171. <https://doi.org/10.26499/jentera.v9i2.2829>
- viva.co.id. (n.d.). *Prabowo Subianto Djojohadikusumo*. Retrieved <https://www.viva.co.id/siapa/read/102-prabowo-subianto-djojohadikusumo>
- Wardani, I. K., Nugroho, A. C., Sabekti, M., & Anif, S. (2024). *Kepemimpinan Berbasis Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara “Ing Ngarso Sun Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani” Untuk Menunjang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar*. 13(2), 2491–2502. <https://www.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/645/477>
- Wiryo, S., & Carina, J. (2025). *Survei Litbang Kompas: 69,5 Persen Responden Khawatir Perluasan Jabatan TNI Mundurkan Reformasi*.
- Zahro, R. A., Aurelia, R. Z., As’syurah, N. D., & Suryaningsi, S. (2025). Menyisipkan ideologi nasionalisme ke dalam gaya hidup modern anak muda. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 1–10.